

Analisis Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022

Yohana G.I. Kusumaningrum^{1*}, Henny A. Manafe², Rere Paulina Bibiana³

^{1,2,3}Magister Manajemen, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

*Email: ika230684@gmail.com

*correspondent author

ABSTRACT

The purpose of this study is to seek the spending execution at the Kupang City Government in the 2018-2022 fiscal year can be said to be good in terms of the analysis of expenditure variance, analysis of expenditure growth, analysis of expenditure harmony and the ratio of expenditure efficiency. The instrument used is the analysis of shopping performance consisting of an analysis of shopping variants, an analysis of expenditure growth, an analysis of expenditure harmony and a ratio of expenditure efficiency. The results of the analysis presented is, a. The expenses execution in terms of analysis of expenditure variance can be said to be good because the implementation of spending is smaller than the budget, b. Expenses execution in terms of an analysis of expenditure growth in 2018-2019 the number of expenditure was increased and resulting positive, but in 2019-2022 the number of expenditure was decreased an resulting negative, c. The expenses execution in terms of analysis of the harmony of spending is more dominant operational expenditure than "modal" expenditure because operational expenditure is up to 90% above of total expenditure while "modal" expenditure is less than 10% of total expenditure, d. The expenses execution in terms of the expenses efficiency ratio can be said to be efficient because the criteria showed the results are below 100%.

Keywords: Budget Realization Report, Expenditure Budget and Regional Spending Analysis

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja belanja pada Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2018-2022 sudah dapat dikatakan baik ditinjau dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kinerja belanja yang terdiri dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja. Hasil analisis yang dikemukakan dapat diketahui bahwa (1) Kinerja belanja ditinjau dari analisis varians belanja sudah dapat dikatakan baik karena realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja, (2) Kinerja belanja ditinjau dari analisis pertumbuhan belanja pada tahun 2018-2019 menunjukkan kriteria bernilai positif dan tahun 2019-2022 menunjukkan kriteria bernilai negatif, (3) Kinerja belanja ditinjau dari analisis keserasian belanja lebih dominan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal karena belanja operasi pengeluarannya di atas 90% dari total belanja, d. Kinerja belanja ditinjau dari rasio efisiensi belanja sudah dapat dikatakan efisien karena pada kriteria tersebut besaran rasio pada kriteria tersebut di bawah 100%.

Kata kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Anggaran Belanja dan Analisis Belanja Daerah

Pendahuluan

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, pada prinsipnya diberikan ruang untuk mengelola kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya dengan didasarkan pada potensi yang dimiliki daerahnya. Penyelenggaraan pemerintahan harus mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal. Menurut (Prabowo & Rafli, 2020:25) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah adalah sumber

daya manusia dan kemampuan aparaturnya serta partisipasi masyarakat, keuangan yang stabil terutama pendapatan asli daerah, peralatan yang lengkap serta organisasi dan manajemen yang baik. Keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang optimal, kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan setiap daerah dalam merumuskan kebijakan pemerintah di bidang keuangan daerah. Pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (Ardhana, 2023:86). Hal tersebut diharapkan agar dengan adanya kemampuan dan kinerja yang baik dan bagus menjadikan keberhasilan otonomi daerah suatu wilayah terwujud dan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nisa' & Qonita, 2023:92). Digdowiseiso et al., (2023:2376) mengemukakan bahwa terdapat banyak penelitian membuktikan bahwa otonomi daerah membawa kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan keuangan daerahnya dengan lebih baik dan meningkatkan rasio kemandirian dan keserasian belanja operasi maupun belanja pembangunan.

Pengelolaan keuangan merupakan kunci penentu keberhasilan dan kesuksesan pembangunan serta pengaturan pemerintah daerah (Anggarini & Hidayat, 2023:143). Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan (Hanifa & Amalia, 2022:35). Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya (Hakim et al., 2023:90). Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi celah signifikan untuk memaksimalkan keuangan daerah (Ratnaningsih & Fajriah, 2023:488). Namun, kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD telah ditingkatkan melalui pemberian penghargaan dan sanksi, tetapi ternyata tidak selalu diikuti dengan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (Lestari & Hutagol, 2023:756).

Salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tahap pertanggungjawaban dan diimplementasikan dalam laporan keuangan yang merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal pengelolaan keuangan publik, pemerintah baik pusat dan daerah dituntut untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Salah satu manfaat dari informasi laporan keuangan yang diperoleh masyarakat adalah mereka dapat melakukan perbandingan kinerja keuangan yang dicapai dengan anggaran yang telah direncanakan. Dari sisi akuntabilitas, dengan tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas (Mahmudi, 2019:4). Kelemahan akuntabilitas tersebut menimbulkan suatu praduga akan lemahnya sistem tata kelola keuangan yang bisa berdampak lebih lanjut pada hal-hal negatif lainnya. Pemerintah daerah dituntut untuk membudayakan akuntabilitas dengan membudayakan menyusun laporan keuangan secara baik dan benar.

Tujuan pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan/menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan atau sumber daya yang dikelola serta membuat keputusan di

bidang ekonomi, sosial maupun politik. Penyajian laporan keuangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya laporan tersebut harus memiliki akuntabilitas dan dapat diakses oleh pihak tertentu yang memiliki kewenangan yaitu DPRD dan masyarakat luas (Nursal & Ananda, 2023:77). Sedangkan, analisis laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan suatu perusahaan dan pemerintah yang berguna bagi penggunaannya untuk dapat membuat keputusan (Sibua & Balamau, 2023:13). Laporan keuangan juga memainkan peranan dalam peramalan dan memberikan informasi yang berguna memprediksi jumlah sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan operasi bisnis (Amelia et al., 2023:309). Sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dan disajikan tepat waktu serta diandalkan. Untuk itu, penyajian laporan keuangan harus dapat memberikan informasi-informasi yang memadai dan dapat menunjang dalam proses pengambilan keputusan (Mahmudi, 2019:3).

Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja merupakan alat ukur yang diperlukan untuk menentukan tingkat pencapaian kegiatan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengukuran kinerja dapat digunakan dalam menentukan sejauhmana tujuan pelaksanaan program dan kegiatan telah tercapai, serta turut membantu masyarakat dalam menentukan apakah tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sejalan dengan jumlah uang yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut (Shadrina & Hidajat, 2023:460). Selain itu, kinerja pemerintah daerah harus dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, karena pemerintah daerah yang mempunyai wewenang mengatur terlaksananya program dan kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan adalah menganalisis dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan membandingkan pencapaian yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dari tahun sebelumnya dengan tahun periode berikutnya sehingga dapat diketahui apakah tujuan pemerintah daerah tercapai dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan memperoleh informasi tentang pencapaian pemerintahan daerah (Yahya, 2023:941). Pengawasan keuangan daerah juga merupakan hal penting untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dan pengawasan merupakan faktor penting yang mendukung laporan keuangan pemerintah daerah akan memiliki nilai informasi yang lebih tinggi dan berdampak lebih lanjut pada kualitas laporan keuangan. Nurmaulidia et al., (2023:859) mengemukakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusnadi et al., (2022:61) mengemukakan bahwa faktor kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Salah satu komponen laporan keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan banyak informasi yang sangat berguna dalam melakukan penilaian kinerja keuangan daerah. Pada laporan ini, para pengguna dapat memperoleh informasi tentang

pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran belanja karena berperan sebagai alat stabilisasi dan distribusi. Hal inilah yang menjadikan Laporan Realisasi Anggaran sebagai laporan pertanggungjawaban utama. Para pengguna laporan keuangan pun dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan salah satunya berupa analisis belanja pemerintah daerah dalam suatu kurun waktu tertentu. Analisis yang mendalam diperlukan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengoreksi hal-hal yang masih kurang untuk dapat ditingkatkan agar tercapainya *good governance*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk tujuan bersama, yaitu dari rakyat dan untuk rakyat (Yusmina & Siswantoro, 2023:158).

Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memiliki cakupan wilayah yang cukup luas. Pemerintah Kota Kupang dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah memberikan informasi yang relevan dan handal mengenai posisi keuangan daerah dan transaksi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah sehingga efektivitas, efisiensi dan kondisi keuangan suatu entitas organisasi dapat dievaluasi dan dinilai. Dalam menganalisis tingkat kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya dapat dilihat dari kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan (Amanda & Praptoyo, 2023:1). Kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang merupakan tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan dan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja pada Pemerintah Kota Kupang. Pada tahun 2018, anggaran belanja ditetapkan Rp. 1.269.506.759.068,13 dengan realisasi sebesar Rp. 1.167.614.842.066,80 terdapat selisih sebesar Rp. 101.891.917.001,33 atau 91,97%. Akan tetapi, di tahun 2019 menunjukkan anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp. 1.279.638.023.585,70 dengan realisasi sebesar Rp. 1.168.795.353.636,88 terdapat selisih sebesar Rp. 110.842.669.948,82 atau 91,34%. Selanjutnya, di tahun 2020 anggaran belanja ditetapkan Rp. 1.197.940.099.855,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.136.643.267.010,25 terdapat selisih sebesar Rp. 61.296.832.844,75 atau 94,88%. Kemudian, di tahun 2021 anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp. 1.184.901.334.565,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.100.199.348.375,47 terdapat selisih sebesar Rp. 84.701.986.189,53 atau 92,85%. Akan tetapi, di tahun 2022 anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp. 1.165.688.918.058,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.043.492.271.157,34 dengan selisih sebesar Rp. 122.196.646.900,66 atau 89,52%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja Pemerintah Kota Kupang yang ditetapkan tidak terealisasi secara menyeluruh karena realisasi yang dicapai lebih kecil dari yang dianggarkan. Dari data anggaran belanja Pemerintah Kota Kupang dapat dilihat apakah anggaran dan realisasi belanja menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan kinerja yang telah dicapai. Namun, saat ini pengelolaan keuangan telah menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Di mana, pada sistem ini kinerja anggaran tidak lagi didasarkan pada habis tidaknya anggaran, tetapi diukur dari tercapai tidaknya target kinerja dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah bersama DPRD.

Tabel 1

Pemerintah Kota Kupang
Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Anggaran Belanja			
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang)	%
2018	1.269.506.759.068,13	1.167.614.842.066,80	101.891.917.001,33	91,97%
2019	1.279.638.023.585,70	1.168.795.353.636,88	110.842.669.948,82	91,34%
2020	1.197.940.099.855,00	1.136.643.267.010,25	61.296.832.844,75	94,88%
2021	1.184.901.334.565,00	1.100.199.348.375,47	84.701.986.189,53	92,85%
2022	1.165.688.918.058,00	1.043.492.271.157,34	122.196.646.900,66	89,52%

(Sumber : LRA BKAD Kota Kupang)

Pada tabel 2 menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan transfer, pembiayaan netto dan SiLPA Pemerintah Kota Kupang tahun 2018-2022.

Tabel 2
Pemerintah Kota Kupang
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja & Transfer (Rp)	Pembiayaan (Rp)	Silpa (Rp)
2018	1.169.535.197.600,75	1.176.772.138.082,80	84.956.909.489,75	77.719.969.007,70
2019	1.164.514.406.237,52	1.177.805.740.087,88	77.521.586.764,70	64.230.252.914,34
2020	1.128.428.149.265,37	1.145.885.087.010,25	59.230.252.913,34	41.773.315.168,46
2021	1.081.199.704.147,59	1.100.199.348.375,47	37.098.965.169,46	18.099.320.941,58
2022	1.066.614.346.568,92	1.043.492.271.157,34	8.099.320.941,58	31.221.396.353,16

(Sumber : LRA BKAD Kota Kupang)

Dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pendapatan daerah menunjukkan angka yang semakin menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh data belanja, transfer daerah dan pembiayaan netto yang menunjukkan adanya trend penurunan realisasi. Namun, pada kolom SiLPA dapat dilihat bahwa di tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adanya kecenderungan jumlah SiLPA yang semakin menurun. Akan tetapi, di tahun 2022 angka SiLPA menunjukkan kenaikan dengan jumlah yang cukup signifikan. Apakah hal ini mengindikasikan bahwa telah terlaksananya efisiensi anggaran, atau karena efisiensi dan efektivitas pendapatan daerah, atau justru karena lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak program dan kegiatan tidak terlaksana dengan optimal.

Tinjauan Pustaka

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah

tersebut. Sedangkan, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah. APBD merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah. APBD sebagai rencana keuangan tahunan menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun (Haryanto & Si, 2008:78). APBD juga berfungsi sebagai instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Untuk itu, seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk memenuhi prinsip dan kebijakan penyusunan APBD.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang telah selesai, dilakukan penilaian/pengukuran secara periodik. Menurut Darise dalam Harahap (2020:34) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan. Menurut Mandua et al., (2022:239) berpendapat bahwa kinerja keuangan merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Kemudian, Sujarweni, (2022:71) berpendapat bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif dengan berdasarkan pada laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, laporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah dan bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu. Salah satu alat ukur untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan

daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Saleh, 2022:11).

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis Laporan Keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2019:10). Tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan untuk pembuatan keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu.

Analisis Belanja Pemerintah Daerah

Sistem penganggaran berbasis kinerja harus diikuti dengan semangat untuk melakukan efisiensi belanja di setiap aspek pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Analisis belanja daerah digunakan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*). Selain itu, rasio ini juga mengukur apakah pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Mahmudi, 2019:154). Menurut Mahmudi (2019) berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, ada beberapa jenis analisis belanja yang bisa dilakukan, antara lain :

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja serta apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi belanja.

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan rasio ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini.

5. Rasio Belanja terhadap PDRB

Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Jalan Frans Seda Kota Baru Kupang. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai dengan Juni tahun 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data diperoleh melalui dokumen-dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dan profil Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. Selain itu, penulis juga menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber pustaka yang mendukung penelitian ini.

Definisi operasional merupakan salah satu instrumen dari riset yang memberikan informasi mengenai operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional variabel di dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu laporan keuangan yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kupang selama satu tahun anggaran.

b. Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan yang telah ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kota Kupang yang berisi daftar sistematis yang memuat rencana pengeluaran selama satu tahun anggaran yang digunakan sebagai pedoman.

c. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

d. Analisis Belanja Daerah

Analisis belanja daerah merupakan alat untuk menganalisis kinerja belanja Pemerintah Kota Kupang dalam mengelola belanja daerahnya. Belanja daerah Pemerintah Kota Kupang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja daerah dalam penelitian ini merupakan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Kupang tahun 2018-2022.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022 pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang akan dianalisis dengan menggunakan berbagai macam analisis dan rasio. Analisis dan rasio yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Analisis Varians (Selisih) Belanja dengan menghitung selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang selama tahun 2018-2022. Analisis ini dapat dirumuskan (Mahmudi, 2019:155).

$$\text{Varians Belanja} = \text{Target Belanja} - \text{Realisasi Belanja} \dots\dots\dots (1)$$

Tabel 3 Kriteria Varians Belanja

Kriteria	Ukuran
Baik	Relalisasi Belanja \leq Anggaran Belanja
Sangat Baik	Relalisasi Belanja $>$ Anggaran Belanja

Sumber: Mahmudi, 2019

- b. Analisis Pertumbuhan Belanja dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2019:158) :

$$\text{Pertumbuhan Belanja th } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Th } t - \text{Realisasi Belanja Th } (t - 1)}{\text{Realisasi Belanja Th } (t - 1)} \dots\dots\dots (2)$$

Tabel 3 Kriteria Varians Belanja

Kriteria	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber: Mahmudi, 2019

- c. Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja dengan membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang tahun 2018-2022. Rasio ini dirumuskan (Mahmudi, 2019:161)

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi } \dots\dots\dots}{\text{Total Belanja Daerah}} \dots\dots\dots (3)$$

- d. Analisis Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dengan membandingkan total belanja operasi dengan total belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang selama tahun 2018-2022. Rasio ini dirumuskan (Mahmudi, 2019:162)

$$\text{Rasio Belanja Operasi thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \dots\dots\dots (4)$$

- e. Analisis Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dengan membandingkan total belanja modal dengan total belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang selama tahun 2018-2022. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \dots\dots\dots (5)$$

- f. Analisis Rasio Efisiensi Belanja dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang selama tahun 2018-2022. Rasio ini dirumuskan (Mahmudi, 2019: 164)

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

Hasil dan Pembahasan

Analisis belanja dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*). Untuk mencapai tujuan penelitian, maka dilakukan analisis belanja daerah yang meliputi analisis varians (selisih) belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis tingkat keserasian belanja, menghitung rasio efisiensi belanja dan rasio belanja daerah terhadap PDRB dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022.

a. Analisis Varians (Selisih) Belanja

Analisis ini dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan tabel 4 secara umum menunjukkan terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bersaldo negatif dan menunjukkan kriteria varians yang baik.

Tabel 4. Analisis Varians Belanja

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih (Rp)	Kriteria Varians
1	2	3	4 = 3 - 2	5
2018	1.269.506.759.068,13	1.167.614.842.066,80	- 101.891.917.001,33	Baik
2019	1.279.638.023.585,70	1.168.795.353.636,88	- 110.842.669.948,82	Baik
2020	1.197.940.099.855,00	1.136.643.267.010,25	- 61.296.832.844,75	Baik
2021	1.184.901.334.565,00	1.100.199.348.375,47	- 84.701.986.189,53	Baik
2022	1.165.688.918.058,00	1.043.492.271.157,34	- 122.196.646.900,66	Baik

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Belanja daerah Pemerintah Kota Kupang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan kriteria yang baik di mana terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bersaldo negatif. Pada tahun 2018, jumlah realisasi belanja sebesar 91,97% dan indikasi penghematan anggaran belanja yang terjadi adalah sebesar 8,03% atau Rp. 101.891.917.001,33. Penghematan yang terjadi berasal dari belanja barang dan jasa yang terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan serta belanja sarana mobilitas darat dengan rata-rata realisasi sebesar 84,75%. Selanjutnya, belanja hibah di mana belanja hibah kepada pemerintah pusat hanya terealisasi sebesar 76,26%. Untuk belanja bantuan sosial kepada masyarakat juga hanya terealisasi sebesar 60,09%. Kemudian untuk belanja tanah hanya terealisasi sebesar 15,88%. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahun 2018 terjadi varians belanja yang bersaldo negatif di mana realisasi belanja lebih kecil dari anggaran dan selisih anggaran tersebut masuk dalam kategori selisih disukai (*favourable variance*) atau menunjukkan kriteria baik.

Pada tahun 2019, jumlah realisasi belanja sebesar 91,34% dan indikasi penghematan anggaran belanja yang terjadi adalah sebesar 8,66% atau Rp. 110.842.669.948,82. Penghematan yang terjadi berasal dari Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang hanya terealisasi sebesar 31,13%, Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang hanya terealisasi sebesar 78,64%, Belanja Tanah dan Belanja Tak Terduga yang tidak terealisasi atau dengan persentase 0,00%. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahun 2019 terjadi varians belanja yang bersaldo negatif di mana realisasi belanja lebih kecil dari anggaran dan

selisih anggaran tersebut masuk dalam kategori selisih disukai (*favourable variance*) atau menunjukkan kriteria baik.

Pada tahun 2020, jumlah realisasi belanja sebesar 94,88% dan indikasi penghematan anggaran belanja yang terjadi adalah sebesar 5,12% atau Rp. 61.296.832.844,75. Penghematan yang terjadi berasal dari Belanja Tanah yang hanya terealisasi sebesar 6,05% dan Belanja Tak Terduga yang hanya terealisasi sebesar 56,54%. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahun 2020 terjadi varians belanja yang bersaldo negatif di mana realisasi belanja lebih kecil dari anggaran dan selisih anggaran tersebut masuk dalam kategori selisih disukai (*favourable variance*) atau menunjukkan kriteria baik.

Pada tahun 2021, jumlah realisasi belanja sebesar 92,85% dan indikasi penghematan anggaran belanja yang terjadi adalah sebesar 7,15% atau Rp. 84.701.986.189,53. Penghematan yang terjadi berasal dari Belanja Tanah yang terealisasi sebesar 8,20%, Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar 20,89% dan Belanja Aset Lainnya terealisasi sebesar 50,16%. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahun 2021 terjadi varians belanja yang bersaldo negatif di mana realisasi belanja lebih kecil dari anggaran dan selisih anggaran tersebut masuk dalam kategori selisih disukai (*favourable variance*) atau menunjukkan kriteria baik.

Pada tahun 2022, jumlah realisasi belanja sebesar 89,52% dan indikasi penghematan anggaran belanja yang terjadi adalah sebesar 10,48% atau Rp. 122.196.646.900,66. Penghematan yang terjadi berasal dari Belanja Hibah yang terealisasi sebesar 40,48%, Belanja Tanah yang terealisasi sebesar 32,63% dan Belanja Tak Terduga yang terealisasi sebesar 21,22%. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahun 2022 terjadi varians belanja yang bersaldo negatif di mana realisasi belanja lebih kecil dari anggaran dan selisih anggaran tersebut masuk dalam kategori selisih disukai (*favourable variance*) atau menunjukkan kriteria baik.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Hasil perhitungan analisis pertumbuhan belanja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Analisis Pertumbuhan Belanja

Tahun	Realisasi Belanja Tahun t (Rp)	Realisasi Belanja Tahun t-1 (Rp)	Hasil %	Kriteria Pertumbuhan
1	2	3	4 = 3 - 2	5
2018-2019	1.168.795.353.636,88	1.167.614.842.066,80	0,10%	Positif
2019-2020	1.136.643.267.010,25	1.168.795.353.636,88	-2,75%	Negatif
2020-2021	1.100.199.348.375,47	1.136.643.267.010,25	-3,21%	Negatif
2021-2022	1.043.492.271.157,34	1.100.199.348.375,47	-5,15%	Negatif

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5, pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Kupang selama tahun 2018-2019 menunjukkan kriteria pertumbuhan positif atau kenaikan pertumbuhan.

Sedangkan selama tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan kriteria pertumbuhan negatif atau penurunan pertumbuhan. Kinerja belanja pada Pemerintah Kota Kupang melalui Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2022 ditinjau dari analisis pertumbuhan belanja pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan pertumbuhan belanja di mana pada tahun 2018 realisasi belanja sebesar Rp. 1.167.614.842.066,80 dan mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar Rp. 1.168.795.353.636,88 atau 0,10%. Sedangkan, di tahun 2020 realisasi belanja sebesar Rp. 1.136.643.267.010,25 atau pertumbuhan belanja turun sebesar -2,75% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021, realisasi belanja sebesar Rp. 1.100.199.348.375,47 atau pertumbuhan belanja turun sebesar -3,21% dari tahun sebelumnya. Sedangkan, tahun 2022 realisasi belanja sebesar Rp. 1.043.492.271.157,34 dan menunjukkan pertumbuhan belanja turun sebesar -5,15% dari tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sehingga kriterianya bernilai positif karena terdapat kenaikan jumlah realisasi belanja sebesar 1.180.511.570,08 atau sebesar 0,10%. Sedangkan untuk 3 (tiga) periode waktu berikutnya yaitu tahun 2019-2020, tahun 2020-2021 dan tahun 2021-2022, pertumbuhan belanja menunjukkan kriteria bernilai negatif karena ada beberapa belanja pemerintah yang tidak terealisasi diantaranya belanja tanah, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga.

c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

(1) *Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja*

Analisis ini dihitung dengan membandingkan belanja tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD. Hasil perhitungan analisis belanja per fungsi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022, disajikan dalam tabel 6. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, maka dapat dibuat tabulasi belanja per fungsi seperti yang telah tersajikan pada tabel 6, di mana pada tahun 2018-2022, terlihat bahwa orientasi belanja pemerintah terletak pada fungsi pelayanan umum pemerintahan dengan prosentase masing-masing sebesar 22,96%, 23,37%, 26,79%, 32,89% dan 31,48%. Setelah fungsi tersebut, kemudian pada tahun 2018-2020 diikuti dengan fungsi kesehatan dengan prosentase masing-masing sebesar 25,31%, 20,16% dan 23,84%. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, fungsi pendidikan menempati nomor urut 2 (dua) untuk orientasi belanja pemerintah dengan besaran prosentase masing-masing sebesar 29,68% dan 29,69%.

Kinerja belanja pada Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditinjau dari analisis keserasian belanja pada belanja per fungsi terhadap total belanja menunjukkan pada tahun 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 14,61%, kesehatan sebesar 25,31%, lingkungan hidup sebesar 4,09%, ekonomi sebesar 9,36% dan perlindungan sosial sebesar 2,24%. Pada tahun 2019, pemerintah mengalokasikan belanja anggaran untuk pendidikan sebesar 17,36%,

kesehatan sebesar 20,16%, lingkungan hidup sebesar 4,86%, ekonomi sebesar 14,06% dan perlindungan sosial sebesar 2,64%. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 17,63%, kesehatan sebesar 23,84%, lingkungan hidup sebesar 4,95%, ekonomi sebesar 8,78% dan perlindungan sosial sebesar 4,62%. Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 29,68%, kesehatan sebesar 17,97%, lingkungan hidup sebesar 3,44%, ekonomi sebesar 3,69% dan perlindungan sosial sebesar 2,86%. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 29,69%, kesehatan sebesar 17,10%, lingkungan hidup sebesar 3,06%, ekonomi sebesar 4,37% dan perlindungan sosial sebesar 2,26%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD, terlihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, pemerintah belum sepenuhnya memenuhi porsi anggaran pendidikan sebesar 20%. Akan tetapi di tahun 2021 dan 2022, anggaran untuk bidang pendidikan telah mencapai porsi yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu sebesar 20%.

Tabel 6. Analisis Belanja per Fungsi

URUSAN	TA. 2018		TA. 2019		TA. 2020		TA. 2021		TA. 2022	
	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%
Pelayanan Umum Pemerintahan	163.999.623.404,00	22,96%	162.466.793.466,00	23,37%	180.297.740.351,00	26,79%	361.901.710.713,00	32,89%	328.451.389.258,00	31,48%
Ketertiban dan Keamanan	9.566.247.283,00	1,34%	10.871.081.199,00	1,56%	10.768.707.147,00	1,60%	29.241.190.565,00	2,66%	30.423.358.945,00	2,92%
Ekonomi	66.902.300.554,00	9,36%	97.769.314.312,00	14,06%	59.071.354.242,00	8,78%	40.563.315.584,00	3,69%	45.597.090.806,40	4,37%
Lingkungan Hidup	29.189.968.952,00	4,09%	33.811.023.271,00	4,86%	33.309.688.830,00	4,95%	37.796.852.628,00	3,44%	31.968.834.865,57	3,06%
Perumahan dan Fasilitas Umum	140.593.415.880,00	19,68%	103.178.385.254,00	14,84%	74.543.080.456,00	11,07%	70.809.185.212,00	6,44%	89.885.188.653,02	8,61%
Kesehatan	180.809.136.147,80	25,31%	140.184.994.476,00	20,16%	160.475.447.649,00	23,84%	197.752.838.782,47	17,97%	178.486.753.212,00	17,10%
Pariwisata dan Budaya	2.976.737.375,00	0,42%	7.891.679.340,00	1,14%	4.915.225.228,00	0,73%	4.158.888.549,00	0,38%	5.252.267.927,00	0,50%
Pendidikan	104.371.104.457,00	14,61%	120.674.999.181,00	17,36%	118.641.655.735,00	17,63%	326.498.875.682,00	29,68%	309.794.122.554,35	29,69%
Perlindungan Sosial	16.025.938.463,00	2,24%	18.353.142.987,19	2,64%	31.070.781.449,00	4,62%	31.476.490.660,00	2,86%	23.633.264.936,00	2,26%
JUMLAH BELANJA	714.434.472.515,80	100,00%	695.201.413.486,19	100,00%	673.093.681.087,00	100,00%	1.100.199.348.375,47	100%	1.043.492.271.157,34	100,00%

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

(2) *Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja*

Analisis ini bermanfaat untuk menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Hasil perhitungan analisis belanja operasi terhadap total belanja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

TAHUN	REALISASI BELANJA		
	BELANJA OPERASI (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	%
2018	876.510.848.949,00	1.167.614.842.066,80	75,07%
2019	922.688.920.522,62	1.168.795.353.636,88	78,94%
2020	913.409.582.038,25	1.136.643.267.010,25	80,36%
2021	896.520.484.058,00	1.100.199.348.375,47	81,49%
2022	904.606.329.833,72	1.043.492.271.157,34	86,69%

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7, hasil penelitian kinerja belanja ditinjau dari analisis rasio belanja operasi terhadap total belanja menunjukkan bahwa struktur belanja Pemerintah Kota Kupang tahun 2018-2022 didominasi oleh belanja operasi.

(3) *Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja*

Analisis ini digunakan bagi para pembaca laporan keuangan sebagai dasar untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan Pemerintah Kota Kupang untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Hasil perhitungan analisis belanja modal terhadap total belanja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022, disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Belanja Modal terhadap Total Belanja

TAHUN	REALISASI BELANJA		
	BELANJA MODAL (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	%
2018	291.103.993.117,80	1.167.614.842.066,80	24,93%
2019	246.106.433.114,26	1.168.795.353.636,88	21,06%
2020	219.502.147.472,00	1.136.643.267.010,25	19,31%
2021	146.418.623.804,47	1.100.199.348.375,47	13,31%
2022	136.100.324.223,62	1.043.492.271.157,34	13,04%

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 8, hasil penelitian kinerja belanja ditinjau dari analisis rasio belanja modal terhadap total belanja menunjukkan bahwa struktur belanja modal Pemerintah Kota Kupang tahun 2018-2022 mengalami penurunan porsi belanja modal di mana pada tahun 2018 sebesar 24,93% dan tahun 2019 turun menjadi 21,06%. Pada tahun 2020, persentase belanja modal semakin turun menjadi 19,31%, selanjutnya pada tahun 2021 turun menjadi 13,31%. Kemudian di tahun 2022, porsi belanja modal semakin menunjukkan penurunan dengan persentase menjadi 13,04%. Hasil penelitian kinerja belanja pada Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditinjau dari analisis keserasian belanja pada rasio belanja modal terhadap total belanja menunjukkan kurang dominannya belanja modal di mana persentase belanja modal tahun 2018 sebesar 24,93%, tahun 2019 sebesar 21,06%, tahun 2020 sebesar 19,31%, tahun 2021 sebesar 13,31% dan tahun 2022 sebesar 13,04%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang lebih memfokuskan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal karena pengeluaran pemerintah lebih difokuskan kepada pengeluaran yang bersifat rutin seperti belanja gaji pegawai dan honorarium PTT, belanja barang dan jasa serta pemeliharaan aset. Terlihat juga bahwa alokasi untuk belanja modal dari tahun 2018-2022 semakin mengalami penurunan. Pada umumnya, proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5%-20%. Pada Pemerintah Kota Kupang, pada tahun 2018 dan 2019, jumlah alokasi belanja modal berada di atas 20%, kemudian di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, jumlah alokasi belanja modal sudah berada di bawah 20%.

(4) Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Analisis rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang. Hasil perhitungan analisis belanja operasi terhadap total belanja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022, disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Rasio Efisiensi Belanja

TAHUN	REALISASI BELANJA (Rp)	ANGGARAN BELANJA (Rp)	Hasil (%)	Kriteria
2018	1.167.614.842.066,80	1.269.506.759.068,13	91,97%	Efisien
2019	1.168.795.353.636,88	1.279.638.023.585,70	91,34%	Efisien
2020	1.136.643.267.010,25	1.197.940.099.855,00	94,88%	Efisien
2021	1.100.199.348.375,47	1.184.901.334.565,00	92,85%	Efisien
2022	1.043.492.271.157,34	1.165.688.918.058,00	89,52%	Efisien

Berdasarkan tabel 9, kinerja belanja pada Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2022 ditinjau dari analisis rasio efisiensi belanja menunjukkan kriteria belanja yang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang telah melakukan efisiensi anggaran karena rasio efisiensinya kurang dari 100%.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja belanja daerah Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2018-2022 ditinjau dari analisis varians biaya sudah dapat dikatakan baik karena realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja. Sedangkan untuk analisis pertumbuhan belanja, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sehingga kriterianya bernilai positif sedangkan 3 (tiga) periode waktu berikutnya yaitu tahun 2020-2022, pertumbuhan belanja menunjukkan kriteria bernilai negatif karena ada beberapa belanja pemerintah yang tidak terealisasi diantaranya belanja tanah, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga. Pada analisis keserasian belanja, pada tahun 2018-2020 pemerintah daerah Kota Kupang belum sepenuhnya memenuhi porsi anggaran pendidikan sebesar 20%, namun di tahun 2021 dan 2022 telah mencapai porsi yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu sebesar 20%. Alokasi belanja operasi terhadap total belanja pada Pemerintah Kota Kupang masih berada di kisaran 60%-90%. Hal ini disebabkan karena pemerintah mengalokasikan sebagian besar belanjanya pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial. Orientasi belanja pemerintah terletak pada belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi selama satu tahun atau yang sifatnya jangka pendek. Sedangkan jumlah alokasi belanja modal Pemerintah Daerah Kupang di atas 20% tahun 2018-2019, namun menurun kembali pada tahun 2020-2022 dimana jumlah alokasi belanja modal sudah berada di bawah 20%. Kriteria belanja daerah jika dilihat melalui rasio efisiensi belanja sudah dapat dikatakan efisien karena angka pada kriteria tersebut berada di bawah 100%.

Referensi

- Aisah, S. (2018). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2010-2016. Universitas Mulawarman Samarinda, 1-16.
- Amanda, C. D., & Praptoyo, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(5), 1–17.
- Amelia, P. S., Nursyabani, D., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019-2021. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 308–313.
- Anggarini, N., & Hidayat, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 141–163.
- Ardhana, M. A. (2023). Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. *MARS Journal*, 3(1), 84–105.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, 2018, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, 2019, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, 2020, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2020.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, 2021, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2021.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, 2022, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang Tahun 2022.

- Digdowiseiso, K., Rahardian, T., & Hartami, L. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan : Studi Kasus Empat Provinsi Otonomi Khusus Periode 2013-2021. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(4), 2374–2400.
- Hakim, N., Abdullah, J., & Hasan, W. (2023). Analisis Kinerja Anggaran Belanja dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 89–96.
- Hanifa, R., & Amalia, V. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniah (JIAR)*, 6(1), 34–48.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis : Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38.
- Hasanah, N & Vidyastutik, E. (2018). Analisis Kinerja realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Jurnal Ecobus*, 6 (2), 26-35.
- Kinerja Haryanto, P., & Si, M. (2008). *PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH*.
- Kusnadi, A., Oemar, F., & Supeno, B. (2022). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 51–63.
- Lestari, S. T., & Hutagol, H. D. (2023). Analisis Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 755–772.
- Lumaku, A & Nindiasari A. (2023). Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. *NCAF : Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 207-211.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed., Vol. 1). UPP STIM YKPN.
- Mandua, T. L., Numberi, C. L., & Werimon, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017-2021. *Lensa Ekonomi*, 16(2), 237–253.
- Nisa', S., & Qonita, N. (2023). Peranan Pengalokasian Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 91–99.
- Nurmaulidia, T., Salim, M. A., & Priyono, A. A. (2023). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah. *E - Jurnal Riset Manajemen*, 12(1), 847–861.
- Nursal, & Ananda, F. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dilihat dari Penyajian Laporan Keuangan dan Aksebilitas Laporan Keuangan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pundi*, 7(1), 77–92.
- Permatasari, D & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi*, 22 (3), 1753-1582.
- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten, Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–28.
- Ratnaningsih, P., & Fajriah, Y. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Belanja Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru. *YUME : Journal of Management*, 6(2), 487–495.

- Riska. (2020). Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. Universitas Muhammadiyah Makassar, 1-96.
- Saleh, R. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada Tahun 2018-2020*.
- Shadrina, H. N., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksebilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah . *Journal of Economics and Business*, 7(1), 459–466.
- Sibua, N., & Balamau, F. (2023). Analisis Kinerja Laporan Realisasi Anggaran pada Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 - 2018. *Jurnal Penelitian Mitita*, 1(1), 12–19.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Analisis Laporan Keuangan, Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. PUSTAKA BARU PRESS.
- Yahya, M. (2023). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah : Pengawasan Keuangan Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 940–947.
- Yusmina, K., & Siswanto, D. (2023). Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 157–180.